

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 065/Kep.167-Organisasi/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gandanegara Nomor 25, Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta,
Purwakarta Jawa Barat 41111



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 065/Kep.167-Organisasi/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 dalam suatu Keputusan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal, 15 Maret 2024

Pj BUPATI PURWAKARTA


BENNI IRWAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 065/Kep.167-Organisasi/2024
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN 2024-2026.

- 1 Nama Organisasi : Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
- 2 Tugas : Mengatur urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945
- 3 Fungsi
- a. Menyelenggarakan pemerintahan di daerah sesuai wilayah kerja dan kewenangannya
 - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah dalam urusan pemerintahan, kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya, fisik, sarana dan prasarana dan lain-lain.

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	
VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"					
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah					
Tujuan :					
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing	1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional : Indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia, yangh dilihat melalui pendekatan Kesehatan (AHH), Pendidikan (RLS dan HLS), dan Pengeluaran perkapita • Formulasi Perhitungan : Nilai IPM yang dikeluarkan oleh BPS <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka/Angka Pengangguran	Persen	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional : Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indicator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. • Formulasi Perhitungan : (Jumlah Pengangguran/Jumlah Angkatan Kerja) X 100% <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>

		3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 + tahun) Formulasi Perhitungan : $TPAK = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$ <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
Sasaran :					
1	Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : Indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia, yang dilihat melalui pendekatan Kesehatan (AHH), Pendidikan (RLS dan HLS), dan Pengeluaran perkapita Formulasi Perhitungan : Nilai IPM yang dikeluarkan oleh BPS <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
		2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis Pendidikan yang pernah dijalani Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis}}{\text{jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100$ <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
		3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : AHLs adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas yang masih sekolah}}{\text{jumlah penduduk 7 tahun ke atas}} \times 100$ <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
		4	Persentase Seni Budaya Daerah yang Dikembangkan	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah seni budaya daerah yang dikembangkan}}{\text{jumlah seni budaya daerah yang terinventarisir}} \times 100\%$ <p><i>Sumber Data : Disporaparbud</i></p>

Sasaran :					
2	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat	1	Tingkat Pengangguran Terbuka/ Angka Pengangguran	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indicator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Formulasi Perhitungan : $(\text{Jumlah Pengangguran} / \text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$ <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 + tahun) Formulasi Perhitungan : $\text{TPAK} = \text{Angkatan Kerja} / \text{Penduduk Usia Kerja} \times 100\%$ <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
		3	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Penghitungan : $(\text{Jumlah pemuda yang berprestasi pada tahun } n) / (\text{jumlah pemuda yang ada}) \times 100$ Tipe Penghitungan : Non Kumulatif <p><i>Sumber Data : Disporaparbud</i></p>
Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup					
Tujuan :					
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : AHH merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang Formulasi Perhitungan : Rata-rata estimasi lamanya tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup, yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH) <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>

Sasaran :					
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : AHH merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang Formulasi Perhitungan : Rata-rata estimasi lamanya tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup, yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH) <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
		2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : LPP adalah angka yang menunjukkan presentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu Formulasi Perhitungan : $LPP = \frac{\text{Penduduk Akhir} - \text{Penduduk Awal}}{\text{Penduduk Awal}} \times 100\%$ <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
Tujuan :					
3	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Poin	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu Formulasi Perhitungan : $IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (30\% \times IKTL)$ <p><i>Sumber Data : DLH</i></p>
			Indeks Ketahanan Daerah	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : IKD merupakan Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi Formulasi Perhitungan : Nilai IKD <p><i>Sumber Data : BPBD</i></p>
Sasaran :					
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Poin	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu

					<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Perhitungan : $IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (30\% \times IKTL)$ <p>Sumber Data : DLH</p>
Sasaran :					
5	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana	1	Indeks Ketahanan Daerah	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : IKD merupakan Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi Formulasi Perhitungan : Nilai IKD <p>Sumber Data : BPBD</p>
		2	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Predikat	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : IRBI merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan Riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian <p>Sumber Data : BPBD</p>
Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal					
Tujuan :					
4	Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output perkapita Formulasi Perhitungan : $(\text{Produk Domestik Bruto pada tahun tertentu (rt)}) / (\text{Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya}) \times 100\%$ <p>Sumber Data : BPS</p>
		2	Inflasi	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu Formulasi Perhitungan : Nilai Inflasi yang dikeluarkan oleh BPS <p>Sumber Data : BPS</p>
		3	Pendapatan Per	Rp.	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional :

			Kapita/PDRB ADHB (Juta)		<p>Pendapatan Per Kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umumnya pendapatan per kapita digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang di suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. • Formulasi perhitungan : Pendapatan nasional/jumlah penduduk <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
Sasaran :					
6	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional : Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. • Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output perkapita. • Formulasi Perhitungan : (Produk Domestik Bruto pada tahun tertentu (rt))/(Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya) X 100% <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
		2	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Persen	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional Persentase Koperasi Aktif adalah perbandingan antara jumlah koperasi yang masih melaksanakan kegiatan usaha terhadap total jumlah koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi • Formulasi Perhitungan : (Jumlah koperasi aktif/jumlah seluruh koperasi) X 100% <p><i>Sumber Data : DKUPP</i></p>
		3	Pertumbuhan UMKM	Persen	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Perhitungan : ((Jumlah UMKM pada Tahun n)-(Jumlah UMKM pada Tahun n-1))/(Jumlah UMKM pada Tahun n) X 100% <p><i>Sumber Data : DKUPP</i></p>
Sasaran :					

7	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	1	Inflasi	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu Formulasi Perhitungan : Nilai Inflasi yang dikeluarkan oleh BPS <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
		2	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : Pendapatan Per Kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Umumnya pendapatan per kapita digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang di suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Formulasi perhitungan : Pendapatan nasional/jumlah penduduk <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
		3	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri terhadap PDRB (Trilyun)	Rp.	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : Seberapa besar sumbangan sector perdagangan dan industri terhadap perekonomian suatu daerah Formulasi Perhitungan : Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri terhadap PDRB <p><i>Sumber Data : DKUPP</i></p>
		4	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	Rp.	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Perhitungan : Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN <p><i>Sumber Data: DPMPTSP</i></p>
Sasaran :					
8	Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	1	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Perhitungan : Destinasi Wisata yang dikembangkan/Jumlah potensi destinasi wisata yang terinventarisir X 100% <p><i>Sumber Data : Disporaparbud</i></p>
		2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Perhitungan : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD <p><i>Sumber Data : Disporaparbud</i></p>
Sasaran :					
9	Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	1	Nilai Tukar Petani	Poin	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Oerasional : Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan

					<p>indek harga yang dibayar petani</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Perhitungan : Nilai NTP yang dikeluarkan oleh BPS <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>	
			2	Skot Pola Pangan Harapan	Poin	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional : Skor PPH merupakan indicator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan • Formulasi Perhitungan : (ketersediaan pangan (ton)/kebutuhan pangan masyarakat setahun (ton)) X 100% <p><i>Sumber Data: Dispangtan</i></p>
			3	Kontribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	Persen	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Perhitungan : Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertanian/Perkebunan dibagi Jumlah PDRB X 100% <p><i>Sumber Data : Dispangtan</i></p>
Tujuan :						
5	Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1	Angka Kemiskinan	Persen	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional : Angka Kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. • Formulasi Perhitungan : (Jumlah rumah tangga yang memiliki pengeluaran lebih kecil atau sama dengan pendapatan per kapita per bulan/Jumlah rumah tangga yang ada) X 100% <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>	
		2	Indeks Gini/Ketimpangan Pendapatan	Poin	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional Indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan • Formulasi Perhitungan : Nilai Gini Rasio yang dikeluarkan oleh BPS <p><i>Sumber Data : Dinsos</i></p>	
		3	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional : rata-rata pengeluaran perkapita konstan/rill yang disesuaikan dengan paritas daya beli (<i>purchasing power parity</i>) berbasis formula Rao 	

					<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Perhitungan : Nilai Pengeluaran Perkapita yang dikeluarkan oleh BPS <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
Sasaran :					
10	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1	Angka Kemiskinan	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : Angka Kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Formulasi Perhitungan : (Jumlah rumah tangga yang memiliki pengeluaran lebih kecil atau sama dengan pendapatan per kapita per bulan/Jumlah rumah tangga yang ada) X 100% <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
		2	Indeks Gini/Ketimpangan Pendapatan	Poin	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional Indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Formulasi Perhitungan : Nilai Gini Rasio yang dikeluarkan oleh BPS <p><i>Sumber Data : Dinsos</i></p>
		3	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : rata-rata pengeluaran perkapita konstan/rill yang disesuaikan dengan paritas daya beli (<i>purchasing power parity</i>) berbasis formula Rao Formulasi Perhitungan : Nilai Pengeluaran Perkapita yang dikeluarkan oleh BPS <p><i>Sumber Data : BPS</i></p>
Sasaran :					
11	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : IPG adalh indicator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM Laki-laki Formulasi Perhitungan : (Jumlah dari pencapaian perempuan untuk harapan hidup + pencapaian

					perempuan untuk Pendidikan + pencapaian perempuan untuk pendapatan) / 3 <i>Sumber Data : DinsosP3A</i>
		2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : IDG adalah Indikator yang menunjukkan apakah Perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik Formulasi Perhitungan : (Jumlah Indeks keterwakilan perempuan di parlemen + Indeks pengambilan keputusan oleh perempuan + Indeks Indeks distribusi pendapatan perempuan)/3 <i>Sumber Data : DinsosP3A</i>
Misi 4 : Meningkatkan ketersediaan Insfratraktur dan Penataan Wilayah					
Tujuan :					
6	Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah	1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : Menyatakan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) Formulasi Penghitungan : (Jumlah Panjang Jalan Kabupaten dengan status mantap (km)Jumlah /Panjang Jalan Kabupaten keseluruhan(km)) X 100% <i>Sumber Data : Dinas PU BMP</i>
			Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Perhitungan : Jumlah pemanfaatan IMB sesuai peruntukan / Jumlah IMB yang berlaku X 100% <i>Sumber Data : Disperkim</i>
Sasaran :					
12	Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah	1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : Menyatakan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) Formulasi Penghitungan : (Jumlah Panjang Jalan Kabupaten dengan status mantap (km)Jumlah /Panjang Jalan Kabupaten keseluruhan(km)) X 100% <i>Sumber Data : Dinas PU BMP</i>
		2	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Penghitungan : Jumlah layanan air bersih yang terlayani/Jumlah kenutuhan layanan air bersih yang harus terlayani X 100% <i>Sumber Data : Dinas PU BMP</i>
Sasaran :					
13	Meningkatnya	1	Rasio Kepatuhan IMB	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Perhitungan :

	Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien		Kabupaten/Kota		Jumlah pemanfaatan IMB sesuai peruntukan / Jumlah IMB yang berlaku X 100% <i>Sumber Data : Disperkim</i>
		2	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Penghitungan : Jumlah layanan air limbah domestik yang terlayani/jumlah kebutuhan layanan air limbah domestik yang harus terlayani X 100% <i>Sumber Data : DLH</i>
		3	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Penghitungan : Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik/jumlah seluruh jaringan irigasi X 100% <i>Sumber Data : Dinas PUTR</i>
Misi 5 : Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, bersih dari KKN, dan Memiliki kepedulian terhadap Masyarakat.					
Tujuan :					
7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih , Efektif dan Akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Perhitungan Nilai yang diperoleh dari hasil implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk tahun berjalan <i>Sumber Data : Hasil Penilaian dari KemenpanRB</i>
		2	Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	<ul style="list-style-type: none"> Hasil evaluasi implementasi SAKIP <i>Sumber Data : KemenpanRB</i>
		3	Nilai LPPD Kabupaten	Poin	<ul style="list-style-type: none"> Hasil evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah <i>Sumber Data : Kemendagri</i>
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan public Formulasi Perhitungan : Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat <i>Sumber Data ; Penyelenggaraan Pelayanan Publik</i>
		5	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	<ul style="list-style-type: none"> DefinisiOperasional : Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Formulasi Perhitungan : Nilai Hasil Indeks Inovasi

					Daerah <i>Sumber Data : Bappelitbangda</i>
		6	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : Opini BPK merupakan pernyataan professional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern. Formulasi Perhitungan : HasilOpini BPK <i>Sumber Data : BPK</i>
Sasaran :					
14	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	1	Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	<ul style="list-style-type: none"> Hasil evaluasi implementasi SAKIP <i>Sumber Data : KemenpanRB</i>
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik <i>Sumber Data ; Penyelenggaraan Pelayanan Publik</i>
		3	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	<ul style="list-style-type: none"> Nilai yang diperoleh dari hasil implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk tahun berjalan <i>Sumber Data : Hasil Penilaian dari KemenpanRB</i>
		4	Indeks SPBE	Poin	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Perhitungan : Nilai Indeks SPBE Kabupaten yang diperoleh dari hasil penilaian yang dilaksanakan oleh KemenPANRB <i>Sumber Data : Hasil Penilaian dari KemenPANRB</i>
Sasaran :					
15	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Indeks Profesionalitas ASN	Predikat	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, kinerja dan Disiplin <i>Sumber Data : BKPSDM</i>
		2	Sistem Merit Kabupaten	Predikat	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : Sistem Merit merupakan

				<p>penyelenggaraan Sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Perhitungan : Nilai Hasil Sistem Merit Kabupaten <p><i>Sumber Data : BKPSDM</i></p>
		3	Nilai LPPD Kabupaten	<p>Poin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah <p><i>Sumber Data : Kemendagri</i></p>
		4	Opini BPK terhadap laporan Keuangan	<p>Opini</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional : Opini BPK merupakan pernyataan professional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern. • Formulasi Perhitungan : HasilOpini BPK <p><i>Sumber Data : BPK</i></p>
		5	Indeks Kemandirian Fiskal	<p>Poin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional : IKF merupakan indicator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatannya tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat • Formulasi Perhitungan : Nilai Hasil IKF yang dikeluarkan oleh Kemenkeu <p><i>Sumber Data : BKAD</i></p>
		6	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Poin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional : IPKD adalah suatu aturan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 yang akan membuat tata Kelola keuangan daerah menjadi lebih baik. • Formulasi Perhitungan : Nilai Hasil IKPD Kabupaten yang dikeluarkan oleh

					Kemendagri <i>Sumber Data : BKAD</i>
		7	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : Maturitas SPIP menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu Tingkat dengan Tingkat lainnya Formulasi Perhitungan : Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai(0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP <i>Sumber Data : BPKP</i>
		8	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Formulasi Perhitungan : Nilai Hasil Indeks Inovasi Daerah <i>Sumber Data : Bappelitbangda</i>
Tujuan :					
8	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : IKUB adalah ruang diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan umat beragama Formulasi Perhitungan: Indeks ini diukur dari tiga indikator, yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama <i>Sumber Data : Kesbangpol</i>
		2	Indeks Desa Membangun	Predikat	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan Formulasi Perhitungan : Indeks komposit dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan

					Ketahanan Ekonomi, dan indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan <i>Sumber Data : DPMD</i>
Sasaran :					
16	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	1	Indeks Desa Membangun	Predikat	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan Formulasi Perhitungan : Indeks komposit dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan <i>Sumber Data : DPMD</i>
Sasaran :					
17	Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional : IKUB adalah ruang diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan umat beragama Formulasi Perhitungan: Indeks ini diukur dari tiga indicator, yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama <i>Sumber Data : Kesbangpol</i>

Pj BUPATI PURWAKARTA

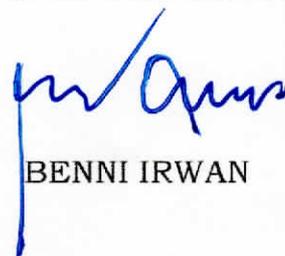

BENNI IRWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 065/Kep.167-Organisasi/2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024-2026.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN			KETERANGAN
			2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,99	73,55	74,11	Bappelitbangda
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,23	9,75	10,24	Disdik
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,85	14,63	15,38	Disdik
4	Persentase Seni Budaya daerah yang dikembangkan	Persen	60,00	80,00	100,00	Disporaparbud
5	Tingkat Pengangguran Terbuka/Angka Pengangguran	Persen	7,00	6,30	5,68	Disnaker
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	82,22	89,58	96,43	Disnaker
7	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	0,06	0,06	0,07	Disporaparbud
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,01	72,32	72,64	Dinkes
9	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,50	1,49	1,48	Bappelitbangda
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	67,49	69,09	70,69	DLH
11	Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,48	0,55	0,66	BPBD
12	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	BPBD
13	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,80	6,10	6,39	Bappelitbangda
14	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Persen	89,70	89,80	90,05	DKUPP
15	Pertumbuhan UMKM	Persen	11,86	13,16	14,69	DKUPP
16	Inflasi	Persen	1,34	1,25	1,16	Bappelitbangda
17	Pendapatan Per Kapita/PDRB ADHB (Juta)	Rp.	82,77	86,73	90,54	Bappelitbangda
18	Distribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)	Rp.	56,08	58,49	60,91	DKUPP
19	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	Rp.	93,32	99,89	106,66	DPMPTSP
20	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	0,03	0,03	0,03	Disporaparbud
21	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	9,23	9,82	10,41	Disporaparbud
22	Nilai Tukar Petani	Poin	101,71	103,00	104,29	Dispangtan
23	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	95,70	97,80	100,00	Dispangtan
24	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,39	6,34	6,29	Dispangtan
25	Angka Kemiskinan	Persen	7,25	6,83	6,44	Bappelitbangda
26	Indeks Gini/Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,306	0,280	0,255	Dinsos P3A
27	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	12,64	12,91	13,18	Bappelitbangda
28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,38	87,60	87,83	Dinsos P3A
29	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	79,92	80,93	81,94	Dinsos P3A
30	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	85,00	85,00	85,00	DPUTR
31	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	81,00	82,00	83,00	Disperkim
32	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	Disperkim
33	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	89,00	90,00	91,00	DLH
34	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	37,60	37,60	37,60	DPUTR
35	Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	69,64	71,64	73,64	Setda

35	Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	69,64	71,64	73,64	Setda
36	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Setda
37	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67,41	70,41	73,41	Setda
38	Indeks SPBE	Poin	2,60	2,80	3,00	Diskominfo
39	Indeks Profesionalitas ASN	Predikat	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	BKPSDM
40	Sistem Merit Kabupaten	Predikat	Baik	Baik	Baik	BKPSDM
41	Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,5	3,5	3,5	Setda
42	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	BKAD
43	Indeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,2280	0,2370	0,2450	BKAD
44	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	82,45	84,09	85,74	BKAD
45	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	3,000	3,000	3,000	Setda
46	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,62	50,68	50,74	Bappelitbangda
47	Indeks Desa Membangun	Predikat	Maju	Maju	Maju	DPMD
48	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	77,95	79,7	81,45	Kesbangpol

Pj BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN